

## Jaringan aktivis Milenial mendesak Menteri Desa Yandri Susanto untuk mundur dari jabatan

Alamsyahputra - [JAKARTA.INDONESIASATU.ID](http://JAKARTA.INDONESIASATU.ID)

Apr 11, 2025 - 18:41



*Unjuk Rasa di Depan kementerian Desa mendesak Yandri susanto untuk mindur*

Jakarta - Jaringan Aktivis Milenial (JAM) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal. Kami menuntut agar Yandri Susanto selaku Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal segera mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu,

kami juga mendesak Presiden untuk memberhentikan menteri tersebut dari posisinya.

Aksi ini muncul sebagai respons terhadap terungkapnya keterlibatan langsung menteri dalam Pilkada Kabupaten Serang. Diketahui Pada saat pembacaan putusan

terhadap perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkaitan dengan Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kabupaten Serang tahun 2024.

Hal ini diungkap oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, "Enny Nurbaningsih" yang menyatakan bahwa Yandri Susanto terbukti terlibat dalam kegiatan yang



mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua, yang

kebetulan adalah istri dari menteri itu sendiri.

salah satu acara yang dihadiri oleh Yandri dan istrinya adalah Rapat Kerja Cabang

(Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, terungkap adanya dukungan dari para kepala desa terhadap pasangan calon nomor urut dua.

Hulman, Kepala Desa Bojong Pandan, dalam keterangannya sebagai saksi di persidangan, menyampaikan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal, Hulman menceritakan, 25 kepala desa dari Kecamatan Tunjung

Teja dan Kecamatan Baros pernah diundang ke kediaman Yandri sebelum penetapan

pasangan calon Pilbup Kabupaten Serang.

Praktik Abuse of power semacam ini sangat merugikan dan berbahaya jika dibiarkan

hidup dalam negara demokrasi. Tindakan tersebut tidak hanya mengancam integritas

demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Kami percaya bahwa setiap tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi harus

ditindak tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan tetap

terjaga.

Lebih lanjut, tindakan menteri tersebut kami anggap melanggar Pasal 283 UU Pemilu,

yang melarang pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya, untuk mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan setelah

masa kampanye. Larangan ini mencakup berbagai bentuk interaksi, seperti

pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil

negara, anggota keluarga, dan masyarakat

Selain itu Kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan

terkait dugaan tindak pidana pemilu dalam kasus ini. Kami berharap tidak ada celah

hukum yang memungkinkan pelaku untuk lolos dari tanggung jawab. Supremasi

hukum diharapkan dapat ditegakkan demi terciptanya demokrasi Indonesia yang lebih

baik.

Kami juga menyoroti secara pribadi kinerja yandri Susanto tidak layak dalam kapasitasnya sebagai menteri negara sebagaimana diawal menjabat ia pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan kop Kemendes untuk acara haul ibunya yang digabung dengan acara santri di salah satu

pondok pesantren yang ada di Serang. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mempertahankan menteri tersebut dalam kabinet. Kami mendesak agar menteri segera mundur dan meminta kepada Presiden untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kami percaya bahwa langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan

publik terhadap pemerintahan, serta untuk memastikan bahwa setiap pejabat negara

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

kami akan kembali lagi minggu depan serta akan melakukan pemasangan spanduk 100 spanduk Dki jakarta dan 200 spanduk di Provinsi banten khususnya kota serang ini dilakukan agar publik tau pemimpin yang di lahirkan dengan proses yang salah akan mengakibatkan kepemghinatan kedepanya ijar amsterdam"